

PERBUDAKAN DI AFRIKA TENGAH PADA MASA KOLONIAL PERANCIS (1881-1914)

Yuli Handayani¹, Khaeruddin^{2*})

^{1,2}Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar
yulih3899@gmail.com, khaeruddin@unm.ac.id
corresponding author*)

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perbudakan di Afrika, mulai dari perbudakan asli hingga perbudakan yang dipengaruhi oleh prancis. Fokus utama penelitian adalah dampak dari perbudakan yang diakibatkan oleh perdagangan budak Trans-Atlantik yang melibatkan bangsa Eropa, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Perancis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, studi Pustaka digunakan untuk memahami fenomena ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan meninjau berbagai referensi seperti buku, artikel, jurnal, dan berita. Khususnya dari abad ke-15 hingga abad ke-19. yang diteliti adalah bagaimana perbudakan mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Afrika serta implikasinya bagi koloni Eropa di Amerika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan budak tidak hanya menyebabkan eksploitasi tenaga kerja besar-besaran tetapi juga mengakibatkan kerusakan sosial dan ekonomi yang mendalam bagi masyarakat Afrika. Perbudakan ini memperkuat kolonialisme Eropa di Amerika melalui sistem kerja paksa, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Meskipun akhirnya perbudakan dihapuskan, dampak destruktifnya masih terasa dalam ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Afrika hingga saat ini. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan perbudakan dalam konteks kolonialisme dan dampaknya terhadap masyarakat lokal di Afrika dan diaspora Afrika di Amerika.

Kata Kunci: Manusia, Budak, Perbudakan

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of slavery in Africa, from original slavery to slavery influenced by Islam and European nations. The main focus of the study is the impact of slavery caused by the Trans-Atlantic slave trade involving European nations, especially the Portuguese, Spanish, Dutch, British, and French. The method used in this study is a qualitative approach, Library studies are used to understand this phenomenon. Data collection techniques are carried out through documentation by reviewing various references such as books, articles, journals, and news, especially from the 15th century to the 19th century. What is studied is how slavery affects the social, economic, and cultural structures of African society and its implications for European colonies in America. The results of the study show that the slave trade not only caused massive labor exploitation but also caused profound social and economic damage to African society. This slavery strengthened European colonialism in America through a system of forced labor, especially in agriculture and plantations. Although slavery was eventually abolished, its destructive impact is still felt in socio-economic inequality in Africa today. This research contributes to a deeper understanding of the legacy of slavery in the context of colonialism and its impact on local communities in Africa and the African diaspora in the Americas.

Keyword: Humans, Slaves, Slavery.

PENDAHULUAN

Ketika satu orang memiliki atau mendominasi orang lain, itu disebut perbudakan. Menurut beberapa sejarawan, perbudakan dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, dengan munculnya pertanian. Pada awalnya, budak adalah penjahat atau mereka yang tidak mampu membayar kewajiban mereka. Tahanan perang terkadang diperlakukan oleh penculik mereka seperti budak pekerja. Ketika konflik dimulai, orang-orang yang menang memperlakukan yang kalah sebagai budak juga. (Fadhil, 2016). Seiring berkembangnya perdagangan dan industri, perbudakan juga ikut berkembang. Kebutuhan akan pekerja untuk membuat barang-barang untuk ekspor meningkat seiring meluasnya perdagangan dan industri. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh para budak. Mayoritas orang zaman dahulu menganggap perbudakan adalah

kejadian normal yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Hanya sedikit yang percaya bahwa perbudakan adalah lembaga yang jahat atau tidak adil. Para budak dapat dibebaskan oleh pemiliknya untuk menjadi warga negara di sebagian besar negara.

Perbudakan kini telah dilarang secara resmi. Oleh karena itu, sangat disayangkan karena perilaku yang tidak jauh berbeda dengan perbudakan masih terjadi hingga saat ini. Pertimbangkan masalah ketenagakerjaan dan tenaga kerja, khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran, yang hampir identik dengan tindakan perbudakan itu sendiri, dan bahkan dapat diartikan demikian. Esai ini berupaya mengidentifikasi kesamaan antara krisis tenaga kerja migran di Timur Tengah dan perbudakan, dua masalah yang saat ini menjadi perhatian banyak orang. Halaman ini membahas masalah-masalah tersebut di atas dengan harapan bahwa semua orang dan negara akan melarang perbudakan dan perdagangan manusia, yang secara terang-terangan bertentangan dengan kodrat manusia. (Al-Katibin Bustan)

"Benua Hitam" adalah sebutan lain untuk Afrika, yang diperkirakan merupakan wilayah seluas 30.295.000 km² dengan panjang sekitar 8.050 km dari utara ke selatan dan 7.400 km dari timur ke barat. Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, dan Afrika Tengah adalah lima wilayah yang membentuk benua Afrika, yang dipisahkan oleh jumlah penduduk, kondisi lahan, dan iklim. Hutan tropis di wilayah Afrika tengah ini, yang meliputi wilayah seluas lebih dari 2,6 juta kilometer persegi, merupakan rumah bagi ribuan pohon besar. Erosi air hujan membuat wilayah ini secara umum kurang cocok untuk tempat tinggal manusia. Wilayah Afrika Tengah kemudian mengalami curah hujan hingga 2,5 meter setiap tahun. yang dapat dikatakan liar dan kurang subur untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Riyadi, 2016).

Orang-orang di daerah ini, khususnya, bergantung pada kekuatan fisik mereka untuk bertahan hidup. Meskipun hanya ada sedikit alam liar di Afrika, sebagian besarnya berada di Afrika Tengah, yang membentang dari wilayah khatulistiwa hingga cekungan Kongo. Ini adalah wilayah Afrika yang luas dengan berbagai sumber daya alam, termasuk emas, besi, dan timah, serta sumber daya manusia yang kuat yang menarik perhatian negara-negara Eropa. Sebelum tahun 1881–1914, dua negara Eropa—Portugal dan Spanyol—telah mulai menyerbu Afrika, yang indah dan kaya akan sumber daya alam, dimulai pada tahun 1525 dan berlanjut hingga akhir abad ke-17. Jumlah negara Eropa yang juga tertarik dan terlibat dalam upaya memajukan Afrika hanya bertambah setelah tahun 1881–1914. Afrika masih diperintah oleh dua negara Eropa selama masa ini, tetapi mereka adalah negara yang berbeda: Prancis dan Inggris. Setelah Inggris, Prancis muncul sebagai negara pendudukan terkuat kedua. Hampir setengah dari Afrika Utara, termasuk Libya, Maroko, dan Aljazair, telah berhasil diduduki oleh Prancis selama masa ini. Republik Afrika, Chad, Kongo, Gabon, dan bagian lain dari Afrika Tengah, serta wilayah Afrika Barat (tidak termasuk Nigeria, Liberia, Ghana, dan Togo) dan beberapa tempat yang lebih kecil di dalamnya (Hammond's, 1909).

Kemudian, sejak zaman Dunia Lama, Afrika telah menjadi penyedia budak dan tenaga kerja manusia yang signifikan. Diperkirakan 9,5 juta budak Afrika telah tiba di Dunia Baru antara tahun 1500 dan 1870, yang menunjukkan adanya perdagangan budak pada masa itu. Kemudian ditetapkan bahwa Portugis juga terlibat dalam perdagangan budak di Afrika sekitar

awal abad ke-16. Budak Afrika dari Afrika diangkut ke berbagai belahan dunia dengan kapal-kapal Portugis pada tahun 1550. Dari perspektif yang lebih kuno, Afrika sendiri memasok budak selama periode Romawi dan Mesir Kuno. Sebelum era modern, perbudakan dipraktikkan di sejumlah negara kuno, termasuk Mesir, Cina, Arab, India, dan Roma. Dengan demikian, perbudakan terus berlanjut hingga era kolonial, ketika perbudakan meluas ke seluruh wilayah, dengan Afrika bertindak sebagai pemasok atau pengeksport budak dan Amerika sebagai negara yang mengimpornya. Afrika sendiri disebut sebagai "Benua Gelap" dan diperkirakan membentang seluas sekitar 8.050 km dari utara ke selatan dan 7.400 km dari timur ke barat. Afrika, yang memiliki wilayah daratan yang luas, juga menawarkan kekayaan yang menjanjikan, termasuk kekayaan pertambangan seperti tembaga, uranium, emas, dan berlian (Haris, 2019).

Meskipun menyoroiti pentingnya manusia dan hewan di Afrika, bangsa-bangsa di Eropa jarang disebutkan secara rinci, terutama setelah era kolonial (1881–1914) berakhir. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 1905, menyusul semua tantangan dan pergolakan yang menyertai periode panjang praktik di Afrika. Meskipun demikian, sudah jelas bahwa isolasi tidak sepenuhnya absen dari kehidupan sehari-hari orang Afrika. Pengusiran berdasarkan garis keturunan tetap merupakan tantangan yang sulit. Praktik ini masih digunakan di beberapa negara Afrika, termasuk Mauritania, Senegal, Chad, Sudan, dan Mali. Perbudakan tidak diatur oleh hukum berdasarkan garis keturunan, terutama di Mali. Karena itu, banyak orang di wilayah Mali masih merasakan dampak pengasingan (Adi, 2021).

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyatakan pada tahun 2018 bahwa perbudakan tradisional masih dipraktikkan di beberapa wilayah Mauritania, Niger, dan Mali. Di wilayah ini, banyak anak di bawah umur terlibat dalam perbudakan; lebih dari 21% anak di bawah usia lima tahun dieksploitasi dan dijadikan pekerja. Penculikan paksa terhadap penduduk Kongo, terutama perempuan dan anak-anak, terus terjadi secara berkala. Di wilayah ini, laki-laki dan anak-anak diperlakukan dengan kasar, sementara perempuan sering dijadikan budak seks. Oleh karena itu, perempuan yang diculik dan dijadikan budak seks menghadapi banyak sekali kekerasan seksual di lokasi ini saja (Annie, 2014).

Perbudakan masih ada hingga saat ini. Menurut laporan dari badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Walk Free, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sekitar empat juta orang Afrika dibebaskan dari perbudakan pada tahun 2021. Mayoritas terdiri dari enam anak-anak dan perempuan. Khususnya di Chad, anak-anak di bawah umur sering diculik dan dijual sebagai budak. Anak-anak dipaksa melakukan tugas-tugas yang menantang, dan perempuan dipaksa bekerja sebagai budak seks atau pekerja seks komersial di tempat lain. Mempertimbangkan berapa banyak orang yang diperbudak di zaman kuno dan era modern awal, berapa banyak orang yang masih menjadi korban perbudakan sekarang, dan contoh-contoh (Elena, 2022).

METODE PENELITIAN

Studi ini bersifat kualitatif, data dikumpulkan melalui penelitian pustaka, khususnya tinjauan atas tulisan-tulisan yang menganalisis Gereja Roma dan referensi lain yang berkaitan dengan topik utama peran Paus Urbanus II dalam mempromosikan perang salib berdasarkan agama. Data yang dikumpulkan untuk penyelidikan ini pada dasarnya diperiksa dan disortir; hanya data yang relevan dan signifikan yang dilaporkan dalam hal ini. Studi pustaka atau studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang melibatkan membaca, memeriksa, menganalisis, dan membuat catatan dari buku-buku literatur, makalah, dan materi terkait penulisan lainnya (Wahdaniya & Nurhidaya, 2022: 5).

Selain itu, penulis menggunakan perspektif historis, dengan kerangka metodologis utamanya adalah sejarah analitis. Sejarah analitis adalah studi metodis tentang kejadian-kejadian historis yang menawarkan interpretasi dan penjelasan mendalam berdasarkan teori dan metodologi yang diterima. Sejarah analitis digunakan oleh penulis untuk menjelaskan penyebab, asal-usul, partisipan, dan semua elemen yang mendasari perbudakan, termasuk fondasi teologis, ekonomi, dan politiknya, dengan menempatkan insiden-insiden ini dalam konteks perbudakan di Afrika Tengah pada masa kolonial Prancis.

PEMBAHASAN

Perbudakan di Afrika

Tiga jenis perbudakan ada di Afrika: perbudakan asli (gaya Afrika murni), perbudakan setelah kedatangan Islam, dan perbudakan yang disebabkan oleh imigrasi orang-orang dari negara-negara Eropa. Jika dibandingkan dengan tiga jenis perbudakan lainnya di Afrika, perbudakan adalah yang memiliki dampak terbesar pada negara-negara Afrika dan Eropa yang telah beremigrasi ke Amerika. Kenyataannya, negara-negara Eropa telah berusaha untuk menembus pedalaman Afrika sejak abad ke-14 sebelum mereka berhasil melakukannya. Mereka belum mengimpor budak dari Afrika sampai mereka akhirnya berhasil masuk ke benua Afrika. (Haris, 2019).

Di antara tempat-tempat lain yang dikunjungi Columbus, orang Eropa membawa adat istiadat baru ke Amerika setelah perjalanannya ke belahan bumi barat pada tahun 1492. Salah satu contoh tradisi ini adalah Perdagangan Budak Transatlantik. Perdagangan budak dimulai pada tahun 1441 ketika Antao Goncalves membeli sepuluh budak dari Afrika dan membawanya ke Portugal (Williams, 2014). Sebelum penggunaan budak Afrika, orang Eropa menggunakan orang Indian di Amerika sebagai budak, menggunakan mereka untuk bekerja di pertanian dan pertambangan, terutama di tambang emas Cibao pada tahun 1494. Tahun berikutnya, Columbus menjual sekitar 550 orang Indian ke Spanyol. Namun, perbudakan orang Indian berumur pendek karena kegigihan mereka dan larangan perbudakan (Resendez, 2016).

Asiento de Negros, monopoli perdagangan budak kulit hitam ke benua Amerika oleh pedagang Katolik, akhirnya disetujui oleh kerajaan Spanyol. Kemudian, perdagangan budak

transatlantik ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah Perdagangan Budak Transatlantik yang dikendalikan oleh Portugis dan Spanyol. Dari tahun 1525 hingga akhir abad ke-17, periode ini berlangsung. Budak digunakan saat ini di wilayah yang berada di bawah otoritas Spanyol dan Portugis, seperti Brasil, Meksiko, dan Kuba. Namun, penyerahan Asiento de Negros kepada Inggris menandai berakhirnya kemegahan Spanyol setelah memasuki puncak monopoli perbudakan (Meredith, 2014). Perjanjian Utrecht, yang secara resmi ditandatangani pada tahun 1713, ditandatangani sebagai hasil dari perang Spanyol tahun 1701–1714 (Christopher, 2006). Yang kedua adalah periode monopoli perbudakan, yang didominasi oleh Prancis, Inggris, dan Belanda. Tahap ini berlangsung dari pertengahan abad ke-17 hingga abad ke-19, ketika perbudakan akhirnya dilarang. Hampir setengah dari semua budak yang diperdagangkan dalam Perdagangan Budak Transatlantik selama masa ini merupakan bagian dari perdagangan budak yang diatur. Biasanya, budak diangkut ke Karibia dan Amerika Utara.

Selama kolonialisme Amerika, ribuan budak diangkut dari Afrika ke Amerika untuk mendukung dan mendukung pekerjaan. Para budak melakukan pekerjaan kasar untuk melindungi tugas. Setelah berhasil masuk ke Afrika, Portugis berusaha mencapai wilayah penghasil emas di benua itu dan mulai menyelidiki perbudakan, karena perdagangan budak di Afrika telah dikenal sejak era Romawi untuk pekerjaan rumah tangga dan keperluan pertanian, khususnya produksi gula (John, 2007). Setelah penjelajahan Columbus di dunia barat, Portugis memulai perdagangan budak pada akhir abad ke-15, dan pedagang dari Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan Eropa Utara segera menyusul. Perdagangan Budak Atlantik dimulai saat ini, karena budak Afrika diangkut tidak hanya (Riyadi, 2016).

Di masa lalu, Afrika merupakan sumber budak yang signifikan, seperti yang disebutkan dalam beberapa jawaban sebelumnya. Budak dari Etiopia dan bagian lain Gurun Sahara selatan dibawa ke Mesir oleh orang Mesir kuno, sebuah praktik yang bertahan hingga era Romawi. Selain itu, dikatakan bahwa perbudakan Afrika menjadi bisnis setelah kedatangan Islam. Hal ini diakui ketika umat Islam di Afrika Utara membangun jalur menuju Afrika sub-Sahara melalui padang pasir. Setelah jalur tersebut dibangun, perdagangan budak menjadi semakin penting, menyusul perdagangan emas Afrika. Ketika Portugis menguasai perdagangan budak pada abad ke-16, sekitar 421 juta budak telah diangkut melalui rute tersebut. Setelah pendudukan Portugis (Carol dkk, 2013), telah dijelaskan bahwa mayoritas budak di wilayah Afrika ini diimpor atau dipasok dari sejumlah wilayah yang dikenal sebagai pemasok budak di Afrika. Wilayah Pantai Barat Afrika Tengah dan sejumlah wilayah teluk antara Afrika Barat dan Afrika Tengah merupakan sumber utama orang Afrika yang dijual sebagai budak. Jumlah budak yang diproduksi di berbagai wilayah Afrika ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Mayoritas budak yang diimpor Belanda, Inggris, dan Prancis ke Amerika digunakan untuk memasok tenaga kerja bagi industri perkebunan dan pertanian. Menurut perkiraan, ada 23.330.000 budak Afrika di Amerika pada tahun 1700, 3.000.000 pada tahun 1800-an, dan sebanyak 6.000.000 pada tahun 1850-an. Pelayaran dari Afrika ke Amerika merenggut nyawa lebih dari satu juta budak. Setelah itu, para budak yang selamat menjalankan tugas mereka dengan menyediakan kebutuhan dasar mereka. Para budak di wilayah tertentu meninggal

karena penyakit, kelaparan, dan kerja berlebihan. Kematian para budak di berbagai wilayah mengharuskan pengadaan budak baru untuk menggantikan yang meninggal (Robin, 1997).

Perbudakan Pada Masa Kolonial Perancis di Afrika

Asiento de Negros, monopoli yang dijalankan Katolik atas perdagangan budak kulit hitam ke Amerika, disahkan oleh monarki Spanyol pada tahun 1518. Kemudian, perdagangan budak transatlantik ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah Perdagangan Budak Transatlantik yang dikendalikan Portugis dan Spanyol. Menurut Christopher (2006), tahap ini berlangsung hingga akhir abad ke-17. Selanjutnya, Belanda, Inggris, dan Prancis memonopoli perbudakan selama periode kedua, 24. Tahap ini berlangsung dari pertengahan abad ke-17 hingga abad ke-19, ketika perbudakan akhirnya dilarang. Selama periode ini, sekitar setengah dari semua budak yang diperdagangkan dalam Perdagangan Budak Transatlantik berasal dari perdagangan budak yang dikendalikan. Biasanya, budak diangkut ke Kepulauan Karibia dan Amerika Utara (Meredith, 2014). Selama kolonialisme Amerika, ribuan budak diangkut dari Afrika ke Amerika untuk menopang dan mendukung tenaga kerja. Para budak melakukan pekerjaan rutin (Robin, 1997).

Pendirian pelabuhan dagang di Afrika Barat pada abad ke-17 memicu minat Prancis di Afrika. Inggris, Jerman, dan Italia termasuk di antara kekuatan kolonial Eropa yang menjajah Afrika pada saat itu, selain Prancis. Konferensi Berlin pada tahun 1884 menyaksikan penandatanganan perjanjian oleh banyak koloni Eropa di Afrika pada saat itu, yang menjadi dorongan bagi negara-negara kolonial, terutama Prancis, untuk mendapatkan kembali kendali dan memanfaatkan semua sumber daya alam Afrika. Kemudian, dalam upaya untuk membentengi wilayah kolonialnya, Prancis membentuk dua federasi perdagangan di Afrika setelah menandatangani kesepakatan di Konferensi Berlin. Wilayah Senegal adalah rumah bagi federasi perdagangan Prancis pertama, dan yang kedua (Manning, 2004).

Kebijakan negara-negara Eropa lainnya di Afrika berbeda dengan kebijakan yang diadopsi Prancis. Negara-negara Eropa lainnya, khususnya Inggris, memiliki kebijakan yang terutama difokuskan pada kawasan ekonomi dan melindungi kepentingan para pemukim Inggris. Sebaliknya, Prancis memiliki kebijakan yang menggabungkan asimilasi budaya dan politik Afrika, yang terutama ditujukan untuk mengeksploitasi Afrika dan meningkatkan prestise Prancis. Ketika budaya asli Afrika—dari bahasa hingga budaya—tidak dihormati oleh kebijakan ini (Fenwick, 2009)

Prancis mengembangkan dan membangun sistem ekonominya sendiri sebagai bagian dari kegiatan kolonialnya, yang sebagian besar merugikan warga negara Afrika dan penduduk koloni Afrika. Selain itu, Prancis membuat koloninya berdagang dengan Paris, di mana rasisme dan ketidaksetaraan menjadi dasar bagi semua kebijakan Prancis di Afrika, di mana Afrika dibagi menjadi wilayah-wilayah "berbahasa Prancis" untuk memajukan politik adu domba. Budaya asli Afrika lebih sering menjadi sasaran kebijakan Prancis yang tidak toleran dan destruktif (Siradag, 2014). Bahkan diketahui bahwa Prancis menjadi terkenal sebagai salah satu kerajaan kolonial paling kuat dan berpengaruh di Afrika.

Dampak Perbudakan Kerja Paksa terhadap Masyarakat Lokal

Penduduk lokal di Afrika Tengah sangat menderita akibat sistem kerja paksa kolonial Prancis. Depopulasi daerah sekitar akibat tingginya angka kematian pekerja merupakan salah satu dampak yang signifikan. Banyak pekerja meninggal akibat kondisi kerja yang buruk, seperti kekurangan makanan dan perawatan medis yang buruk. Hochschild menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, angka kematian buruh tambang dan perkebunan karet di Kongo Prancis dapat mencapai 50%. Hal ini diperparah oleh penyakit yang disebabkan oleh kondisi hidup dan kerja yang tidak sehat. Selain banyaknya korban jiwa, perekrutan paksa sering kali mengakibatkan perpisahan keluarga. Stabilitas sosial terganggu karena para pria dewasa yang direkrut dipaksa meninggalkan keluarga mereka dan wanita serta anak-anak ditinggalkan dalam situasi yang tidak menentu. Di bawah praktik kolonial yang keras, kehidupan sosial masyarakat Afrika Tengah yang sebelumnya diatur oleh konvensi dan ikatan kekeluargaan yang kuat hancur. Hal itu memperkuat kesenjangan yang sudah ada, khususnya antara penduduk asli dan kekuatan kolonial yang menggunakan kerja paksa sebagai sarana untuk mendapatkan lebih banyak otoritas atas tanah dan sumber daya (Hochschild, 1998).

Selain dampak langsung seperti kematian dan pemisahan keluarga, perbudakan kerja paksa juga memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat Afrika Tengah. Hilangnya tenaga kerja produktif, terutama laki-laki dewasa, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di daerah-daerah pedesaan. Banyak masyarakat lokal yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten terpaksa menghadapi kelaparan dan kemiskinan akibat kurangnya tenaga kerja di lahan pertanian. Akibatnya, produksi pangan menurun drastis, yang menyebabkan ketergantungan pada pasokan dari luar dan makin memperkuat dominasi kolonial.

Salah satu contoh kejahatan transnasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang berpusat pada pelanggaran hak anak adalah fenomena perekrutan anak sebagai tentara, yang merupakan akibat dari konflik di Republik Afrika Tengah. Anak-anak yang direkrut atau digunakan oleh kelompok bersenjata akan terpengaruh selama sisa hidup mereka; mereka yang selamat akan mengalami pengalaman yang mengerikan, dan dampak psikologis dari kekerasan yang mereka saksikan dapat berlangsung hingga dewasa. Puluhan ribu anak telah direkrut oleh pemerintah dan tentara pemberontak; mayoritas adalah laki-laki, tetapi banyak juga anak perempuan yang terlibat. Banyak dari anak-anak muda ini dikumpulkan secara paksa, diculik dari jalanan, atau bahkan dari sekolah dan panti asuhan. Anak-anak mendambakan rasa aman dari kekerasan di sekitar mereka, sementara yang lain termotivasi untuk bergabung dengan kelompok bersenjata karena kemiskinan atau ketakutan. Selain dipaksa menjadi budak seks bersama tentara yang lebih tua, anak perempuan dikirim untuk memasak atau merawat yang terluka sementara anak laki-laki dimanfaatkan sebagai kuli atau tukang suruhan. Untuk memutus semua hubungan dengan masyarakat, beberapa bahkan dipaksa melakukan kejahatan terhadap kerabat mereka sendiri (Bayu, 2018).

Lebih jauh, degradasi ekosistem juga merupakan akibat dari praktik kerja paksa. Eksploitasi karet, penambangan skala besar, dan penggundulan hutan untuk perkebunan semuanya dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini menyebabkan hilangnya sumber daya alam yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat setempat, kerusakan habitat, dan berkurangnya kesuburan tanah. Bagi banyak komunitas, hilangnya akses terhadap tanah dan sumber daya alam berarti hilangnya kemandirian ekonomi dan sosial. Dari perspektif psikologis dan budaya, sistem kerja paksa juga berdampak pada trauma yang mendalam. Pengalaman kekerasan, pemaksaan, dan eksploitasi terus membekas di benak masyarakat, mengubah dinamika sosial dan melemahkan kepercayaan antaranggota komunitas. Proses dehumanisasi yang terjadi selama era kolonial meninggalkan luka yang dalam dan memengaruhi generasi berikutnya dalam hal identitas dan harga diri kolektif. Dalam jangka panjang, dampak ini memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi yang berlanjut hingga era pasca-kolonial. Banyak negara-negara Afrika Tengah yang menghadapi kesulitan untuk membangun kembali perekonomian dan struktur sosial yang hancur akibat eksploitasi brutal selama masa kolonial. Sistem kerja paksa ini bukan hanya bentuk eksploitasi tenaga kerja, tetapi juga strategi untuk mempertahankan dominasi kolonial dengan menindas masyarakat lokal dan menguras sumber daya mereka.

Untuk menjalankan perkebunan dan tambang, tenaga kerja paksa dari penduduk asli dan budak Afrika digunakan secara luas. Di Brasil, sistem *encomienda* dan perbudakan menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk asli yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Perbudakan tidak hanya mempengaruhi kondisi kerja tetapi juga struktur sosial, dengan penduduk asli dan keturunan Afrika sering kali mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Kebijakan ekonomi kolonial juga mengganggu struktur sosial dan budaya masyarakat asli. Banyak komunitas adat dipaksa meninggalkan cara hidup tradisional mereka dan beralih kepekerjaan paksa di tambang dan perkebunan. Penghancuran hutan-hutan dan perubahan penggunaan lahan menghilangkan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan dan budaya mereka. Akibatnya, banyak bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional yang mulai menghilang di bawah dominasi budaya colonial (Muna *et al.*, 2024).

Reformasi dan Akhir Masa Perbudakan (1914)

Pada awal abad ke-20, tekanan internasional mulai meningkat untuk mengakhiri praktik eksploitasi brutal seperti kerja paksa di wilayah-wilayah kolonial. Banyak negara, termasuk Perancis, menghadapi sorotan internasional yang semakin kuat mengenai perlakuan terhadap penduduk pribumi di wilayah kolonial mereka. Kelompok-kelompok anti-perbudakan di Eropa, seperti *Anti-Slavery Society*, menggalang dukungan dan menyebarkan laporan-laporan tentang kekejaman yang dilakukan di koloni-koloni, termasuk di Afrika Tengah. Tekanan ini menjadi faktor pendorong bagi pemerintah kolonial Perancis untuk mulai mengubah pendekatan mereka terhadap kebijakan tenaga kerja dan agraria di wilayah koloninya (TodJones, 2015).

Salah satu momen penting dalam perubahan kebijakan kolonial Perancis adalah ketika Perang Dunia I semakin mendekat, yang membawa perhatian pada pentingnya stabilitas di wilayah kolonial. Perang menciptakan kebutuhan yang mendesak bagi Perancis untuk

memobilisasi sumber daya manusia dan alam dari koloni-koloni Afrika untuk mendukung upaya perang. Namun, praktik kerja paksa dan eksploitasi brutal menciptakan ketidakstabilan di banyak wilayah kolonial, dengan pemberontakan dan perlawanan dari masyarakat lokal yang semakin sering terjadi. Oleh karena itu, pemerintah Perancis mulai mempertimbangkan reformasi sebagai upaya untuk meredakan ketegangan sosial dan memastikan dukungan masyarakat kolonial selama masa perang.

Reformasi kebijakan agraria dan tenaga kerja mulai diperkenalkan oleh Perancis, meskipun pada kenyataannya, proses ini berjalan sangat lambat dan seringkali tidak konsisten. Salah satu perubahan yang mulai terlihat adalah pengurangan penggunaan kekerasan dalam merekrut pekerja untuk proyek-proyek kolonial, serta upaya untuk memberikan insentif bagi tenaga kerja dalam bentuk kompensasi atau upah yang lebih adil. Namun, meskipun ada perubahan ini, kondisi kerja para pekerja pribumi tetap sangat buruk, dengan banyak dari mereka yang tetap dipaksa bekerja di perkebunan dan tambang dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dari perbudakan. Pekerja sering kali masih harus menghadapi jam kerja yang panjang, minimnya akses terhadap perawatan medis, dan kurangnya jaminan keselamatan di tempat kerja (Nizmi, 2020).

Menurut sejarawan Catherine Coquery-Vidrovitch, reformasi yang dilakukan oleh Perancis pada periode ini lebih merupakan upaya simbolis untuk meredakan tekanan internasional daripada perubahan mendasar dalam cara kolonialisme beroperasi. Reformasi agraria dan tenaga kerja yang dilakukan oleh Perancis cenderung hanya bersifat kosmetik, tanpa mengubah struktur kekuasaan kolonial yang tetap eksploitatif dan menindas. Dalam banyak kasus, meskipun kerja paksa secara resmi dihapuskan, berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja yang lebih halus tetap berlanjut. Salah satu contoh adalah sistem kerja wajib, di mana penduduk pribumi diwajibkan untuk bekerja pada proyek-proyek kolonial sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai warga di bawah pemerintahan kolonial (Catherlin, 2009).

Sistem kerja wajib ini pada dasarnya adalah bentuk lain dari kerja paksa yang disamarkan dalam bingkai hukum kolonial. Para pekerja sering kali dipaksa untuk bekerja dalam proyek-proyek seperti pembangunan jalan, jalur kereta api, dan proyek infrastruktur lainnya yang bertujuan mendukung eksploitasi sumber daya alam di Afrika Tengah. Sistem ini tetap berjalan hingga pertengahan abad ke-20 di beberapa wilayah, meskipun Perancis secara resmi telah menghapuskan praktik kerja paksa. Oleh karena itu, reformasi yang dilakukan oleh Perancis pada periode ini tidak cukup untuk menghentikan eksploitasi brutal terhadap penduduk pribumi. Dampak dari praktik kerja paksa dan eksploitasi kolonial yang dilakukan oleh Perancis di Afrika Tengah tetap terasa hingga hari ini. Salah satu warisan paling nyata dari era kolonial ini adalah ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang masih sangat mencolok di banyak negara bekas koloni Perancis. Masyarakat pribumi yang selama berabad-abad dieksploitasi di bawah sistem kolonial, hingga hari ini masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah, pendidikan, dan pekerjaan. Struktur sosial yang dibentuk selama periode kolonial, di mana segelintir elite lokal dan perusahaan multinasional menguasai sebagian besar kekayaan, tetap bertahan dan menjadi sumber ketidakadilan di era modern (David, 2019).

Ketidaksetaraan agraria juga menjadi salah satu masalah besar yang diwariskan dari era kolonial. Selama masa kolonial, tanah-tanah subur di Afrika Tengah diambil alih oleh perusahaan kolonial dan digunakan untuk perkebunan karet, kopi, dan tanaman komersial lainnya. Para petani pribumi dipaksa meninggalkan tanah mereka atau bekerja sebagai buruh di perkebunan-perkebunan ini tanpa memiliki hak kepemilikan atas tanah. Ketika Perancis akhirnya mundur dari Afrika Tengah pada pertengahan abad ke-20, struktur agraria yang tidak adil ini tetap bertahan, dengan sebagian besar tanah produktif tetap berada di tangan perusahaan asing atau elite lokal yang bekerja sama dengan penjajah. Patrick Manning, sejarawan yang meneliti dampak kolonialisme di Afrika, salah satu dampak paling signifikan dari eksploitasi kolonial di Afrika Tengah adalah kerusakan struktural pada masyarakat lokal. Kolonialisme tidak hanya merampas sumber daya alam dan tenaga kerja, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial tradisional yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Afrika. Kehidupan sosial yang sebelumnya diatur oleh norma-norma adat dan hubungan kekerabatan tergantikan oleh struktur kolonial yang memaksa masyarakat pribumi untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa kolonial. Akibatnya, banyak komunitas lokal kehilangan otonomi dan kedaulatan mereka, yang berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial mereka sendiri setelah kolonialisme berakhir (Patrick, 1990).

Kerusakan struktural ini juga berdampak pada perkembangan politik di Afrika Tengah setelah kemerdekaan. Banyak negara bekas koloni Perancis mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan pemerintahan yang lemah dan korupsi yang merajalela. Sejarawan Jean Suret-Canale berpendapat bahwa salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan ini adalah warisan kolonial yang meninggalkan sistem pemerintahan otoriter yang berpusat pada segelintir elite, serta ketergantungan ekonomi pada ekspor sumber daya alam yang dieksploitasi oleh perusahaan asing. Secara keseluruhan, meskipun Perancis secara resmi mengakhiri praktik perbudakan dan kerja paksa pada awal abad ke-20, dampak dari eksploitasi kolonial yang mereka lakukan di Afrika Tengah tetap terasa hingga hari ini. Reformasi yang dilakukan oleh Perancis pada periode akhir kolonial tidak cukup untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang dibangun selama ratusan tahun, dan dampak dari eksploitasi ini masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara bekas koloni Perancis di Afrika Tengah dalam mencapai kesejahteraan dan stabilitas di era modern (Suret-Canale, 1971)

PENUTUP

Perbudakan di Afrika mengidentifikasi tiga periode utama sejarah perbudakan di Afrika: perbudakan pada masa kolonial Perancis, dan perbudakan yang diperparah oleh campur tangan Eropa. Ketika orang Eropa mulai berpartisipasi aktif dalam perdagangan budak, khususnya setelah penjelajahan Columbus dan pertumbuhan perdagangan budak transatlantik, perbudakan memiliki dampak terbesar di Afrika dan Eropa. Penduduk asli Amerika pertama kali diperbudak oleh orang Eropa di Amerika, tetapi karena kurangnya perlawanan dan fakta bahwa perbudakan adalah ilegal bagi mereka, orang Afrika menjadi korban utama perdagangan budak. Orang Portugis dan Spanyol adalah yang pertama mempraktikkan perbudakan, diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Perancis.

Bahkan sebelum orang Eropa terlibat, Afrika merupakan sumber utama budak. Namun, dengan terciptanya rute perdagangan Atlantik menyusul kedatangan Portugis dan pedagang Eropa lainnya, perdagangan budak menjadi lebih terorganisasi. Akibatnya, jutaan orang Afrika dibawa ke Amerika sebagai budak, sebagian besar untuk membantu ekonomi perkebunan. Depopulasi, disintegrasi sosial, dan eksploitasi sumber daya manusia dan alam yang meluas merupakan beberapa dampak negatif dari sistem ekonomi ini di Afrika. Sepanjang era kolonial, orang Eropa terutama Prancis menerapkan sistem kerja paksa yang memperburuk kondisi kehidupan orang Afrika. Perbudakan dan kerja paksa terus berlanjut dalam waktu yang lama meskipun ada pertentangan dari penduduk setempat, dan dampaknya masih dapat dilihat hingga saat ini, khususnya dalam kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di bekas koloni Eropa di Afrika. Inisiatif reformasi awal abad ke-20 hanya bersifat simbolis; tidak berdampak pada sistem kolonial yang eksploitatif. Di Afrika, dampak perbudakan masih terasa hingga saat ini dalam bentuk trauma sosial, ketidakadilan ekonomi, dan ketimpangan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. (2021). *Kolonialisme dan Praktik Perbudakan di Afrika: Sejarah dan Realitas Masa Kini*.
- Annie. (2014). *Laporan tentang Perbudakan dan Eksploitasi Anak di Afrika*. Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
- Anderson, David M. 2019. *Kolonialisme dan Kerja Paksa: Ekonomi Eksploitasi di Afrika*. New York: Oxford University Press.
- Bayu, R. (2018) 'Kerjasama Pemerintah Republik Afrika Tengah dan UNICEF dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Republik Afrika Tengah Rahellia', *Journal of International Relations*, 4(4), pp. 757–764.
- Carol, P., Curtin, P., Feierman, S., Thompson, L., & Vansina, J. (2013). *Sejarah Afrika: Dari Masa Paling Awal hingga Kemerdekaan*. London: Longman.
- Coquery-Vidrovitch, Catherine. 2009. *Africans: The History of a Continent* (Sejarah Afrika: Sejarah Benua). Cambridge: Cambridge University Press.
- Elena. (2022). *Laporan tentang Perbudakan di Masa Modern*. United Nations, International Labour Organisation (ILO), International Organisation for Migration (IOM), dan The Walk Free Organisation.
- Fadhil, A. (2016) 'Perbudakan Dan Buruh Migran Di Timur Tengah', *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 14(1), pp. 161–178. Available at: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyyat/article/view/618>.
- Fenwick, C. (2009). *Perancis dan Pengalaman Kolonial Afrika: Sejarah Kolonisasi dan Asimilasi Budaya*. London: Routledge.
- Hammond's. (1909). *Penjajahan Perancis di Afrika Utara dan Tengah: Dominasi Kolonial di Wilayah Libya hingga Republik Afrika Tengah*.
- Haris. (2019). *Afrika: The Dark Continent dan Kekayaan Sumber Daya Alamnya*.

- Hochschild, Adam. 1998. *Hantu Leopold: Kisah Keserakahan, Teror, dan Kepahlawanan di Afrika Kolonial*. Boston: Houghton Mifflin.
- Muna, A.N. *et al.* (2024) 'Transformasi Ekologis dan Sosial di Amerika: Dampak Kebijakan Ekonomi terhadap Lingkungan dari Era Kolonial hingga Abad ke-21 M', *Polyscopia*, 1(3), pp. 80–85. Available at: <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1344>.
- Meredith, M. (2014). *Keberuntungan Afrika: Sejarah 5000 Tahun tentang Kekayaan, Keserakahan, dan Usaha*. London: Simon & Schuster.
- Manning, P. (2004). *Diaspora Afrika: Sejarah melalui Budaya*. New York: Columbia University Press.
- Nizmi, Y.E. (2020) 'Analisis Pengaruh Perang, Kemiskinan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Konteks Perdagangan Manusia', *Review of International Relations*, 2(1), pp. 70–79. Available at: <https://doi.org/10.24252/rir.v2i1.15423>.
- Patrick. 1990. *Perbudakan dan Kehidupan Afrika: Perdagangan Budak Barat, Timur, dan Afrika*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Robin, L. (1997). *Perdagangan Budak Antar-Samudra: Sejarah Perbudakan dan Kematian*. New York: HarperCollins.
- Riyadi. (2016). Pembagian Geografis dan Iklim Benua Afrika.
- Resendez, A. (2016). *The Other Slavery: The Uncovered Story of Indian Enslavement in America*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Siradag, A. (2014). *Warisan Kolonial di Afrika: Dari Konferensi Berlin hingga Era Pasca-Kolonial*. London: Palgrave Macmillan.
- Siradag, A. (2014). *Warisan Kolonial di Afrika: Dari Konferensi Berlin hingga Era Pasca-Kolonial*. London: Palgrave Macmillan.
- Tod Jones (2015) *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.